



Alif Putra Kusuma<sup>1</sup>  
 Muhamad Husein  
 Maruapey<sup>2</sup>  
 Neng Virly Apriliyani<sup>3</sup>

## IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) DI KELURAHAN JATIJAJAR KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Inpres No. 3 Tahun 2022 yang mengubah cakupan wilayah kepengurusan Kampung KB, yang sebelumnya setingkat dusun atau RW menjadi tingkat Desa atau Kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Kampung KB Jatijajar Kota Depok, menganalisis faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas berjalan dengan sangat baik. Namun, ditemukan faktor penghambat dalam mengimplementasikan program Kampung KB tersebut yaitu faktor migrasi penduduk, faktor lingkungan dan faktor Kesehatan. Sedangkan upaya strategi untuk mengurangi faktor-faktor tersebut yaitu menjalankan kegiatan atau program dibidang Kesehatan, lingkungan, ekonomi yang melibatkan masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Implementasi Kebijakan, Program Kampung Keluarga Berkualitas

### Abstract

This research is motivated by the existence of Presidential Instruction no. 3 of 2022 which changes the scope of the KB Village management area, from previously being at the hamlet or RW level to being at the village or sub-district level. This research aims to describe the implementation of the Jatijajar Family Planning Village program in Depok City, analyzing the inhibiting factors and the efforts made to overcome these inhibiting factors. The method used is descriptive qualitative. The results of the research show that the implementation of the Quality Family Village program is going very well. However, inhibiting factors were found in implementing the Family Planning Village program, namely population migration, environmental factors and health factors. Meanwhile, strategic efforts to reduce these factors include carrying out activities or programs in the fields of health, environment and economics that involve the community.

**Keywords:** Implementation, Policy Implementation, Quality Family's Village Program.

### PENDAHULUAN

Kampung Keluarga Berkualitas adalah unit wilayah yang setara dengan Desa atau Kelurahan, yang memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Di dalamnya, terdapat program-program yang terintegrasi antara Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, seiring dengan pengembangan sektor terkait dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Fokus utamanya adalah pada penguatan lembaga keluarga dan komunitas melalui beragam program dan kegiatan dengan pendekatan siklus hidup. Pada awalnya, berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2022, unit wilayah yang setara dengan RW atau Dusun disebut sebagai Kampung Keluarga Berencana. Namun, seiring perubahan kebijakan dan kebutuhan masyarakat, nama program ini telah diubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,

<sup>1,2,3</sup> Universitas Djuanda  
 email: alifputra762@gmail.com

Pemerintah Daerah Kota Depok mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang peningkatan ketahanan keluarga. Peraturan ini menjelaskan bahwa keluarga, sebagai unit kecil dalam masyarakat, dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya dan memiliki martabat sebagai keluarga yang sejahtera. Keluarga juga berperan penting dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa, dan perlu diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk memenuhi hak-haknya, seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak perlindungan, dan hak partisipasi, serta menjalani kehidupannya dengan cara yang wajar. Untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam pasal 12 ayat 2 menyebutkan bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan kewajiban pemerintah daerah yang terpisah dari pelayanan dasar (Remiswal et al., 2021).

Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar diresmikan oleh Pemerintah Kota Depok pada tahun 2019 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 4 sasaran program yaitu: mengadakan layanan data keluarga & dokumen kependudukan, peralihan tingkah laku pada keluarga, meningkatkan ruang lingkup pelayanan & rujukan pada keluarga serta menata lingkungan keluarga, dengan pendekatan 4 dari 8 fungsi keluarga yaitu: fungsi Pendidikan, fungsi Agama, fungsi Ekonomi dan fungsi Reproduksi (Purwanto & Sulistyastuti, 2007).

Berdasarkan observasi dan wawancara awal, peneliti menemukan permasalahan yakni 1) Letak Kampung KB Kelurahan Jatijajar berada di dekat Terminal Bus Jatijajar Kota Depok sehingga kondisi lingkungannya yang padat penduduk dan sedikit kumuh. 2) Adanya penyempitan aliran kali Cipinang akibat sampah sehingga membuat aliran air selokan warga yang tidak mengalir dengan baik. 3) Berdasarkan data migrasi yang bersumber dari tim Rumah Dataku tahun 2022, menunjukkan bahwa wilayah Kelurahan Jatijajar mengalami peningkatan penduduk sebanyak 8-10 orang per bulannya dan mayoritas masyarakat Jatijajar adalah pendatang dari luar Kota Depok. Berdasarkan data dari Tim Rumah Dataku di tahun 2022, keluarga beresiko stunting menunjukkan angka yang tinggi yaitu 74,1% hal tersebut disebabkan pola makan masyarakat yang belum memenuhi gizi dan kemampuan ekonomi yang menengah ke bawah (Maruapey et al., 2018).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu : studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti sebagai informan kunci yang turun ke lapangan serta berusaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi dari informan-informan terkait dengan implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar Kota Depok. Teknik ini dilakukan secara bertahap dan terintegrasi (Prof. Dr. Sugiyono, 2019).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Pelaksana pokja Kampung KB Jatijajar, Lurah Jatijajar, Ketua Seksi Pengendalian Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan serta masyarakat yang tinggal di lingkungan Kampung KB tersebut. Kemudian peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi dengan para informan terkait implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok. Untuk memperoleh data/informasi dari penelitian tersebut, peneliti mewawancarai 9 informan dengan informan utamanya adalah Ketua Pokja (kelompok Kerja) Kampung KB Jatijajar dan Lurah Jatijajar sekaligus Pengarah pokja Kampung KB (Winarno, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kampung Keluarga Berkualitas Di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok**

Kampung KB diresmikan pada Tahun 2019 di RW.01 Kelurahan Jatijajar oleh Pemerintah Kota Depok yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan keluarga melalui Program Pengendalian Penduduk serta kondisi RW.01 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok yang berdekatan dengan Terminal Bus Jatijajar dan padat

penduduk. Sejak Tahun 2022, Pemerintah mengeluarkan Inpres No.3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas yang sebelumnya Kampung KB (Keluarga Berencana) setingkat Dusun atau RW menjadi Kampung Keluarga Berkualitas setingkat Desa atau Kelurahan. Semenjak aturan tersebut diberlakukan program-program dan kegiatan-kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar Kota Depok menyelenggarakan seperti di bidang Kependudukan, ekonomi, lingkungan, sosial, Pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya dengan sumber anggaran bersumber dari APBN, APBD, CSR (swasta) dan swadaya masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar turut serta mengajak peran para warga setempat untuk mencapai suatu tujuannya sekaligus memberdayakan dan mengedukasi Masyarakat (Aji & Yudianto, 2020).

Bersumber dari BKKBN, Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok berklasifikasi “Berkelanjutan” yang artinya pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian. Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di sini merupakan bentuk pembaharuan yang di sebutkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan menjalankan UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Perda Kota Depok No. 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga (Nugroho, 2017).

Meninjau kembali dari adanya keterbatasan dalam mengimplementasikan program Kampung KB sebelumnya, pemerintah pusat mengeluarkan dan menetapkan Inpres tersebut dengan upaya memudahkan bagi pengurus dan pihak-pihak terkait dalam menimplementasikan program Kampung KB tersebut. Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar Kota Depok menerapkan 4 fungsi dari 8 fungsi keluarga yaitu fungsi Pendidikan, fungsi Agama, fungsi Ekonomi dan fungsi Reproduksi (Supriyanto et al., 2021).

#### **Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam (Latief et al., 2023). Wawancara peneliti terkait bagaimana komunikasi antar implementor dan komunikasi dengan kelompok sasaran (masyarakat) dengan Lurah Jatijajar, Ketua Pelaksana Pokja Kampung KB Jatijajar dan Ketua Seksi Pengendalian Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi antar implementor berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut dikarenakan pihak implementor (Lurah Jatijajar, Pokja dan Pokmas) Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar Kota Depok saling berkoordinasi dan berkomunikasi dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan-kegiatan di Kampung KB Jatijajar Kota Depok. Selain itu, pihak implementor (Pokja dan Pokmas) Kampung KB Jatijajar Kota Depok selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dijalankan di Kampung KB Jatijajar Kota Depok melalui sosmed maupun bekerjasama dengan pihak jurnalis (PWRI Jaya) agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Selanjutnya Pokja Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar Kota Depok juga berkomunikasi dengan Pemkot Depok hingga BKKBN Provinsi Jawa Barat sehingga para implementor (Pokja, Pokmas dan kader) Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar Kota Depok dapat meningkatkan kualitas kerjanya untuk masyarakat di Wilayah Kelurahan Jatijajar Kota Depok. Kemudian, komunikasi implementor dengan masyarakat juga sangat baik, hal tersebut dikarenakan pihak Pokja Kampung KB Jatijajar menginformasikan kegiatan-kegiatan Kampung KB Jatijajar Kota Depok selain di sosmed atau di berita-berita online, Pokja Kampung KB Jatijajar memiliki grup lingkungan RT/RW di Whatsapp sehingga memudahkan hubungan komunikasi dan informasi kepada masyarakat di Wilayah Kelurahan Jatijajar Kota Depok (Maleke et al., 2022).

Kemudian, hasil wawancara peneliti terkait kejelasan informasi dengan beberapa masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pokja, Pokmas dan Kader Kampung KB Jatijajar Kota Depok dengan masyarakat sangat baik, hal ini karena setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan diinformasikan dengan sangat jelas dan terperinci. Sarana komunikasi yang Pokja, Pokmas dan Kader Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok dengan masyarakat seperti melalui surat edaran, grup lingkungan RT/RW di whatsapp dan pengeras suara dari Mushollah dan Masjid.

#### **Sumber Daya**

Berdasarkan hasil penelitian sumber daya menggambarkan salah satu variabel yang terpenting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan karena sumber daya mewujudkan dalam menjalankan suatu kebijakan, Edward III dalam (Latief et al., 2023). Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait jumlah pelaksana, sumber anggaran dan sarana prasana dengan Lurah Jatijajar, Ketua Pelaksana Pokja Kampung KB Jatijajar Kota Depok dan ketua Seksi Pengendalian Data & Dokumen Kependudukan, peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya kelompok kerja Kampung KB Jatijajar Kota Depok sangat baik. Hal ini, dikarenakan jumlah anggota pokja Kampung KB Jatijajar Kota Depok melibatkan seluruh pengurus RT/RW dan kelompok masyarakat di wilayah Kelurahan Jatijajar Kota Depok, sedangkan kelompok kerja inti berjumlah 20-30 orang. Perihal, sumber anggaran yang diperoleh pokja Kampung KB Jatijajar Kota Depok untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dan program-program berasal dari APBN, APBD Kota Depok, swasta dan swadaya masyarakat. Fasilitas penunjang yang dimiliki oleh pengurus Kampung KB Jatijajar Kota Depok antara lain: Papan Data Kependudukan, Kantor sekretariat terpadu Kampung KB, Wifi Publik, sebuah komputer beserta printer, Posyandu yang tersebar di RT/RW di wilayah Jatijajar Kota Depok, BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja), Tim Rumah Dataku dan UPPKS (Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok melibatkan seluruh elemen masyarakat di wilayah Kelurahan Jatijajar Kota Depok (Sumaryadi, 2005)

#### **Disposisi/Sikap Pelaksana**

Berdasarkan hasil penelitian disposisi merupakan keberhasilan selanjutnya dalam implementasi kebijakan. Disposisi ini menggambarkan sikap implementor dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berdasarkan beberapa hasil wawancara peneliti terkait sikap pelaksana, komitmen dan inovasi yang dihasilkan dengan Lurah Jatijajar, Ketua Pelaksana, Ketua Pelaksana Pokja Kampung KB Jatijajar Kota Depok dan ketua Seksi Pengendalian Data & Dokumen Kependudukan dan masyarakat bahwasanya disposisi atau sikap pelaksana dari implementor (Pokja, Pokmas dan Kader) Kampung KB Jatijajar Kota Depok dalam mengimplementasikan program-program kegiatan sangat baik, hal tersebut dikarenakan para pokja dan kader Kampung KB Jatijajar Kota Depok sangat menerima semua materi-materi dari program-program pelatihan dan penyuluhan dari pihak Kelurahan sampai Provinsi, para kelompok kerja ini memiliki komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab dalam menjalankan program atau kegiatan di lingkungan Kampung KB Jatijajar Kota Depok. Komitmen yang tinggi dari kelompok kerja Kampung KB Jatijajar menghasilkan beberapa inovasi diantaranya: pelayanan pembuatan data dan dokumen kependudukan bagi warga, SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu), imunisasi bagi bayi 0 tahun hingga lansia, program padat karya, DASHAT (Dapur Sehat), 1 telur 1 imah, kegiatan pengajian bagi ibu-ibu dan bapak-bapak dan kegiatan PAUD (Pendidikan bagi Anak Usia Dini). Bagi warga dan masyarakat program dan kegiatan yang dijalankan di Kampung KB Jatijajar sangat bermanfaat dan memudahkan karena sikap para pokja dan kader yang ramah, koordinatif dan komunikatif sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan menerima saran-saran dari para pokja, pokmas dan kader Kampung KB Jatijajar Kota Depok (Abdul Wahab, 2015).

#### **Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil penelitian struktur birokrasi merupakan hal terpenting berikutnya dalam mengimplementasikan kebijakan, struktur birokrasi dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi para implementor dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan kebijakan, struktur birokrasi atau organisasi adalah tempat di mana para pegawai, anggota birokrasi, atau pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan kebijakan berinteraksi dan melaksanakan berbagai kegiatan terkait, seperti yang diungkapkan oleh (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait struktur birokrasi dan penerapan SOP dengan Lurah Jatijajar, Ketua Pelaksana dan Ketua Seksi Pengendalian Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan bahwasanya struktur birokrasi pada kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar Kota Depok sangat baik, hal tersebut dikarenakan semua pokja yang terlibat dalam kepengurusan Kampung KB menerapkan SOP (Standar Operasional

Prosedur) dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta para pokja Kampung KB ini memahami dan menjalankan sesuai rencana-rencana kerja yang telah ditetapkan.

### **Faktor-faktor Penghambat**

Faktor penghambat sangat mempengaruhi dalam mengimplementasikan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat tiga faktor penghambat implementasi Kampung KB Jatijajar Kota Depok yaitu:

#### 1. Bertambahnya jumlah penduduk.

Penambahan jumlah penduduk yang mayoritas berasal dari luar wilayah Jatijajar dan Kota Depok, rata-rata adalah tinggal sementara atau kontrak karena hal ini membawa dampak bagi program-program yang dijalankan di Kampung Keluarga Berkualitas. Berdasarkan data dari tim rumah dataku ada 1-5 KK per hari nya.

#### 2. Lingkungan yang padat serta cukup kumuh.

Karena letak geografis wilayah Kelurahan Jatijajar yang sangat strategis menjadikan wilayah tersebut menjadi hunian yang strategis bagi para warga dan masyarakat. Berdasarkan observasi dan wawancara jumlah penduduk Jatijajar Kota Depok berjumlah kurang lebih 35.000 jiwa, kondisi lingkungan yang padat penduduk serta cukup kumuh sangat mempengaruhi kesehatan bagi warga dan masyarakat.

#### 3. Kali Cipinang yang tidak mengalir dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kondisi kali Cipinang yang melintasi wilayah Kelurahan Jatijajar Kota Depok cukup memprihatinkan, karena hal tersebut disebabkan struktur bangunan Terminal Bus Jatijajar Kota Depok yang menyempitkan aliran Sungai serta sampah-sampah yang menumpuk menyebabkan aliran air di kali Cipinang tidak mengalir dengan baik.

### **Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir faktor penghambat yang terjadi di lapangan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat upaya-upaya yang untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi saat di lapangan diantaranya yaitu:

#### 1. Menyeleksi para pendatang dengan mengeluarkan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara).

Untuk tetap memberikan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat Kampung KB Jatijajar Kota Depok seluruhnya. Pokja Kampung KB Jatijajar khususnya kader tim Rumah Dataku mengeluarkan SKTS tersebut kepada warga pendatang yang tinggal sementara atau mengontrak (minimal warga tersebut sudah tinggal selama 3 bulan).

#### 2. Menyelenggarakan kerja bakti lingkungan.

Kerja bakti lingkungan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat di lingkungan RT/RW nya masing-masing guna membersihkan lingkungan Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar, meminimalisir lingkungan yang kotor /kumuh serta memberdayakan masyarakat.

#### 3. Melakukan komunikasi dengan pihak pengelola Terminal Bus Jatijajar Kota Depok.

Kelompok kerja Kampung KB Jatijajar Kota Depok melakukan komunikasi dengan pihak pengelola Terminal Bus mengenai pelibatan masyarakat Jatijajar Kota Depok dalam kegiatan-kegiatan padat karya di lingkungan Terminal Bus Jatijajar Kota Depok, komunikasi tersebut berjalan dengan baik dan mencapai kesepakatan. Selanjutnya pokja Kampung KB Jatijajar Kota Depok juga berkomunikasi perihal penyempitan aliran kali Cipinang namun ada respon dari pihak pengelola Terminal Bus akibat sistem birokrasi pengelolaan Terminal Bus Jatijajar Kota Depok yang dikelola langsung oleh BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) di bawah Kemenhub RI.

#### 4. Pokja, Pokmas dan Kader Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar melakukan penimbangan rutin 1 bulan sekali terhadap Balita dan Lansia.

Penimbangan berat badan rutin 1 bulan sekali bagi balita bertujuan untuk memantau kondisi AKG (Angka Kecukupan Gizi) bagi anak-anak serta menanggulangi anak-anak dari resiko stunting dan kegiatan posyandu bagi lansia bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan fisik dan mental bagi manula yang tinggal di lingkungan Kampung KB Jatijajar.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di posyandu-posyandu lingkungan RT/RW wilayah Jatijajar Kota Depok.

## SIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok berjalan dengan sangat baik. Kampung KB Jatijajar Kota Depok sudah menjalankan Inpres No. 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan pengelola Kampung KB Jatijajar Kota Depok melibatkan seluruh elemen masyarakat Jatijajar dalam menyelenggarakan program-program dengan penuh rasa tanggung jawab dan berkomitmen sehingga menghasilkan suatu inovasi-inovasi yang memberikan kemudahan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat di wilayah Kelurahan Jatijajar Kota Depok. Kampung KB Jatijajar Kota Depok berklasifikasi “Berkelanjutan” yang artinya pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran serta memiliki kontribusi terhadap pencapaian. Selain itu, berkat keaktifan dari kelompok kerja Kampung KB Jatijajar serta partisipasi dari masyarakat yang tinggi, Kampung KB Jatijajar meraih juara 1 tingkat Kota Depok dalam penguatan Kampung Keluarga Berkualitas se-Kota Depok.

Pertama, komunikasi, hubungan komunikasi dalam menyampaikan informasi antar implementor sangat baik karena implementor (pokja, pokmas dan kader) Kampung KB Jatijajar Kota Depok memiliki grup whatsapp RW se-kelurahan Jatijajar dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan maupun yang sedang dilaksanakan di lingkungan masing-masing, selanjutnya hubungan implementor dengan Pemerintah juga sangat baik karena pokja Kampung KB Jatijajar selalu memperbaharui data-data kegiatan 1 tahun sekali di papan data kependudukan, aktif memposting kegiatan-kegiatan di Kampung KB di sosmed dan website resmi BKKBN dan bekerja sama dengan jurnalis-jurnalis di Kota Depok untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar kepada masyarakat luas. Kemudian, hubungan komunikasi implementor dengan masyarakat juga sangat baik karena mereka media dalam menyampaikan informasi melalui grup whatsapp lingkungan RT masing-masing, surat edaran dan pengeras suara mushollah atau masjid.

Kedua, sumber Daya yaitu jumlah pokja inti dalam kepengurusan Kampung KB Jatijajar berjumlah 20-30 orang serta melibatkan pokmas, karang taruna, LPM dan tim PKK Kelurahan Jatijajar dalam mengimplementasikan program kegiatan-kegiatan di Kampung KB Jatijajar Kota Depok. Sumber anggaran dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di Kampung KB berasal dari APBN, APBD, CSR/swasta dan Swadaya masyarakat. Fasilitas penunjang dalam menjalankan program Kampung KB yaitu : Papan Data Kependudukan, Kantor sekretariat terpadu Kampung KB, Wifi Publik, sebuah komputer beserta printer, Posyandu yang tersebar di RT/RW di wilayah Jatijajar Kota Depok, BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja), Tim Rumah Dataku dan UPPKS (Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

Ketiga, disposisi/Sikap Pelaksana yaitu sikap implementor (pokja, pokmas dan kader) dalam mengurus dan menjalankan program atau kegiatan-kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar. Para pokja dan kader Kampung KB Jatijajar Kota Depok sangat menerima semua materi-materi dari program-program pelatihan dan penyuluhan dari pihak Kelurahan sampai Provinsi, para kelompok kerja ini memiliki komitmen yang tinggi dan bertanggung jawab dalam menjalankan program atau kegiatan di lingkungan Kampung KB Jatijajar Kota Depok. Komitmen yang tinggi implementor menghasilkan inovasi-inovasi seperti pelayanan pembuatan data dan dokumen kependudukan bagi warga, SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu), imunisasi bagi bayi 0 tahun hingga lansia, program padat karya, DASHAT (Dapur Sehat), 1 telur 1 imah, kegiatan pengajian bagi ibu-ibu dan bapak-bapak dan kegiatan PAUD (Pendidikan bagi Anak Usia Dini). Selain itu, para pokja dan kader Kampung KB Jatijajar Kota Depok bersikap ramah terhadap warga dan masyarakat sehingga masyarakat menerima informasi-informasi dengan baik.

Keempat, struktur Birokrasi yaitu Struktur organisasi pokja dalam mengimplementasikan program Kampung KB di Kelurahan Jatijajar Kota Depok, struktur birokrasi pada kelompok

kerja Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar Kota Depok sangat baik, hal tersebut dikarenakan semua pokja yang terlibat dalam kepengurusan Kampung KB menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta para pokja Kampung KB ini memahami dan menjalankan sesuai rencana-rencana kerja yang telah ditetapkan. Dalam mengimplementasikan program Kampung Keluarga Berkualitas Jatijajar Kota Depok peneliti menemukan beberapa faktor penghambat di lapangan, diantaranya 1) Bertambahnya jumlah penduduk. 2) Lingkungan yang padat serta cukup kumuh. Karena letak geografis wilayah Kelurahan Jatijajar yang sangat strategis menjadikan wilayah tersebut menjadi hunian yang strategis bagi para warga dan masyarakat. 3) Kali Cipinang yang tidak mengalir dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan observasi dan wawancara peneliti terkait upaya-upaya strategis untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, yaitu 1) Menyeleksi para pendatang dengan mengeluarkan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara). 2) Menyelenggarakan kerja bakti lingkungan. 3) Melakukan komunikasi dengan pihak pengelola Terminal Bus Jatijajar Kota Depok. 4) Pokja, Pokmas dan Kader Kampung Keluarag Berkualitas (KB) Jatijajar melakukan penimbangan rutin 1 bulan sekali terhadap Balita dan Lansia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Abdul Wahab, S. (2015). *Analisis kebijakan : Dari Formulasi Sampai Implementasi*.
- Aji, M. S., & Yudianto, G. P. H. (2020). Pemberdayaan masyarakat “Kampung KB” ditinjau dari perspektif Ottawa Charter. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8(2), 206–218.
- Latief, S., Syahrudin, F. I., Nulanda, M., & Mokhtar, S. (2023). Faktor Risiko Penderita Kanker Ovarium di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. *Wal'afiat Hospital Journal*, 4(1), 46–56.
- Maleke, T. S., Pangkey, M., & TAMPONGANGOY, D. (2022). Efektivitas program kampung keluarga berencana (kb) di desa temboan kecamatan maesaan kabupaten minahasa selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(119).
- Maruapey, M. H., Rusli, B., Karlina, N., & Rahmatunnisa, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*.
- Nugroho, R. (2017). Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik. *PT Elex Media Komputindo*.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (edisi ke 2). ALFABETA.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2007). *Metode penelitian kuantitatif: Untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial*.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Remiswal, R., Samad, D., & Firman, A. J. (2021). EVALUASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KELUARGA PADA KAMPUNG KB DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATRA BARAT. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(2), 102–115.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. Citra Utama.
- Supriyanto, U., Arenawati, A., & Cadith, J. (2021). Implementasi Kebijakan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Millennial Entrepreneur. *Jurnal Governansi*, 7(1), 39–50.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing Service.